



PT BPR
BANK TULUNGAGUNG
PERSERODA

PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 Jl. Pahlawan No. 17 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

☎ (0355) 323656

📠 323656

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.

17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) beserta perubahan-

perubahannya.

45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : SUHERMIN, SE NIK : 3504014903770006 Jabatan : 0100 - Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Bersama dengan Direksi lain, menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 2. Bersama dengan Direksi lain, menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan 3. Bersama dengan Direksi lain memberikan penjelasan mengenai Rencana jangka pendek, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang kepada RUPS setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 4. Memimpin perusahaan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan operasional dan bisnis perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi serta kegiatan usaha BPR. 5. Memimpin dan mengkoordinir Direksi lain dan seluruh Pejabat Eksekutif secara profesional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan) 6. Memastikan seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi beserta nilai-nilai budaya perusahaan. 4. Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap pentingnya pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risikonya serta menumbuhkan komitmen dalam rangka pencapaian Target Bisnis sesuai komitmen dan target didalam Rencana Kerja & Anggaran BPR 7. Melakukan pengawasan jalannya perusahaan, kinerja usaha dan operasional BPR secara

		disiplin dan berkala
		8. Bersama Direksi lain melakukan analisa, pengawasan dan pemantauan terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR
		9. Melakukan pengawasan terhadap Daftar Monitoring Tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan Audit Intern maupun Eksternal untuk diselesaikan sesuai kom
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SULIS MASRUHAH, SE
	NIK	: 3504046901710001
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Direktur Kepatuhan & SDM bersama Direksi lain menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Bidang Kepatuhan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan /ketentuan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan 2. Mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur fungsi Kepatuhan sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau RUPS . Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 3. Melakukan pencegahan yg dilakukan terhadap pengambilan kebijakan dan/atau keputusan penting yang mengandung unsur ketidakpatuhan, yang apabila kebijakan dan /atau keputusan tersebut diambil akan dapat menimbulkan risiko bagi BPR, terutama dalam transaksi-transaksi di bidang perkreditan, penanaman / penempatan dana lainnya 4. Memastikan fungsi manajemen risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur risiko kepatuhan Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan yg berlaku, antara lain melakukan pemantauan penerapan prosedur kepatuhan (compliance procedure) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan 6. Memantau & menjaga kepatuhan BPR

		terhadap seluruh komitmen yg dibuat oleh BPR kepada OJK dan kesanggupan untuk memenuhi perintah atau larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: HADI WIJAYA, SP
	NIK	: 35040327110690001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaaa : 1. Membantu Direktur Utama menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan 1. Membantu Direktur Utama menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur operasional dan bisnis BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada RUPS/Kepala Daerah /KPM dan Otoritas Jasa Keuangan Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 2. Membantu Direktur Utama untuk mengkoordinir secara profesional Pejabat Eksekutif BPR di Bagian Operasional dan Bisnis untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) BPR dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan). 3. Memastikan seluruh kegiatan Operasional dan Kantor Unit Layanan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan alur Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi dan nilai-nilai budaya perusahaan. 4. Membantu Direktur Utama dalam memastikan risiko operasional dan bisnis yang melekat pada produk dan aktivitas baru telah terkelola dengan baik serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian risiko yang memadai yaitu telah mendapatkan telaah dan rekomendasi dari Satuan Kerja Kepatuhan /Manajemen Risiko sebelum dijalankan Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 5. Membantu Direktur Utama dalam melakukan pengawasan jalannya kegiatan dibidang operasional dan bisnis BPR 6. Membantu Direktur Utama dalam memantau dan mengawasi setiap Pelaporan Internal maupun eksternal (ke OJK dan/atau Otoritas Lainnya) menurut jenis dan waktu

	pelaporannya yang menjadi kewajiban Unit Kerja Operasional serta Kantor Unit Layanan Kas secara rutin dan disiplin
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
- Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. - Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : DRS. SUKAJI, M.SI NIK : 350404021901640001 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : - Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/Kepala Daerah/KPM - Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan Bisnis & Operasional BPR Tugas dan Tanggungjawab Operasional : - Melakukan pengawasan terhadap BPR untuk : a.)Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b.)Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Lainnya. - Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan - Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat meliputi : a.Rencana Bisnis BPR b.Isu-isu strategis BPR c.Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis d.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi - Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi

		pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR
		8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR
		9. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH
	NIK	: 3504086908680001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : - Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/Kepala Daerah /KPM - Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan Bisnis & Operasional BPR Tugas dan Tanggungjawab Operasional : - Melakukan pengawasan terhadap BPR untuk : - Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Lainnya. - Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan - Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat meliputi : - Rencana Bisnis BPR - Isu-isu strategis BPR - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis - Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi - Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko

		dan fungsi audit intern pada BPR
		9. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: NYADIN,MAP
	NIK	: 350401112700001
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Komisaris Independen dan/atau Komite-Komite yang dibentuk di BPR 2. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 3. Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain 4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. 5. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. 6. Menjamin akuntabilitas organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham). 7. Melaporkan Hasil Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 8. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik 9. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik
Rekomendasi Kepada Direksi		
		• Agar Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. • Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. • Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. • Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. • semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. • Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUHERMIN, SE	3504014903770006	-	-
2	SULIS MASRUKAH, SE	3504046901710001	-	-
3	HADI WIJAYA, SP	35040327110690001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHERMIN, SE	3504014903770006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SULIS MASRUKAH, SE	3504046901710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	HADI WIJAYA, SP	35040327110690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHERMIN, SE	3504014903770006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SULIS MASRUKAH, SE	3504046901710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	HADI WIJAYA, SP	35040327110690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	-	-
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	-	-
3	NYADIN,MAP	350401112700001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NYADIN,MAP	350401112700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NYADIN,MAP	350401112700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	932.639.472	2	296.400.000
2	Tunjangan	3	317.299.824	2	98.800.000
3	Tantiem	3	131.557.892	2	76.365.058
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	2	0
Total			1.381.497.188		471.565.058

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Direktur Utama memperoleh fasilitas kendaraan dinas jenis Toyota Innova Venturer, Direktur Kepatuhan dan SDM memperoleh kendaraan dinas jenis Toyota Innova dan Direktur Bisnis dan Operasional memperoleh kendaraan dinas jenis Toyota Avanza.	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,46	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,31	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,58	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-24	9	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2	2023-5-9	10	Evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2023
3	2023-7-26	10	Evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2023
4	2023-10-25	10	Evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2023
5	2023-10-13	9	Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan umum OJK tahun 2023
6	2023-12-10	10	Pembahasan RBB tahun 2024 dan evaluasi kinerja tahun 2023

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	5	0	83,00%
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	6	0	100,00%
3	NYADIN,MAP	350401112700001	5	0	83,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

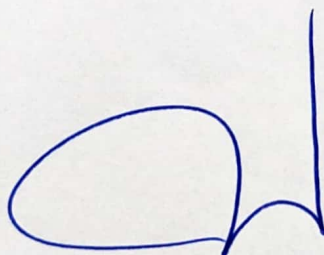
No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-01-16	Sosial	Pemberian hadiah partisipan kegiatan culture festival	Pemerintah Daerah	148.690
2	2023-01-27	Sosial	Milad MTSN 6 Tulungagung	Sekolah	250.000
3	2023-02-15	Sosial	Bantuan jamban sehat kpd masyarakat kurang mampu	Masyarakat	10.000.000
4	2023-02-15	Sosial	Bantuan Token Listrik kpd masyarakat	Masyarakat	2.000.000
5	2023-03-15	Sosial	Partisipasi Neon Box di kantor Dekranasda Kab. Tulungagung	Dekranasda Kab Tulungagung	1.500.000
6	2023-03-24	Sosial	Santunan Yatim Piatu	KKKS Kab Tulungagung	1.000.000
7	2023-03-30	Sosial	Santunan Yatim Piatu Tahap 2	KKKS Kab Tulungagung	4.000.000
8	2023-03-30	Sosial	Pemberian sembako 50 pack ke masyarakat sekitar kantor PT BPR Bank Tulungagung	Masyarakat	9.734.400

9	2023-04-14	Sosial	Pemberian sembako kpd masyarakat Ds Punjul Karangrejo	Masyarakat	1.067.600
10	2023-05-11	Sosial	Bantuan Pembuatan Gapuro Wisata Kampung ikan Ds Sumberejo Kulon Ngunut	Desa Sumberejo kulon Ngunut	8.800.000
11	2023-06-23	Sosial	Bantuan pengadaan Bendera Merah Putih 400 buah	PemKab Tulungagung	8.000.000
12	2023-07-14	Sosial	Partisipasi peresmian gedung MPP Tulungagung	PemKab Tulungagung	3.000.000
13	2023-07-18	Sosial	Partisipasi kegiatan Wilis Exotic Charm & Muslim Fashion Festival Tulungagung	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab Tulungagung	3.000.000
14	2023-08-18	Sosial	Partisipasi Hari Perumahan Nasional di Dinas Perumahan & Pemukiman Kab Tulungagung	Dinas Perumahan & Pemukiman Kab Tulungagung	2.500.000
15	2023-08-25	Sosial	Partisipasi kegiatan Senam Kreasi Perwosi PKK Kab Tulungagung	PKK Kab Tulungagung	3.000.000
16	2023-08-31	Sosial	Partisipasi kegiatan Funbike & Lomba burung Dinas Perhubungan KAB Tulungagung	Dinas Perhubungan KAB Tulungagung	1.000.000
17	2023-09-29	Sosial	Partisipasi kegiatan Tennis Club HUT RE ke-78	PemKab Tulungagung	1.000.000
18	2023-09-12	Sosial	Partisipasi PORPROV Jatim	PemKab Tulungagung	4.000.000
19	2023-09-18	Sosial	Partisipasi Gerak Jalan Kreasi HUT Tulungagung	PemKab Tulungagung	10.000.000
20	2023-09-25	Sosial	Partisipasi Bulan Dana PMI Tulungagung	Kantor PMI Tulungagung	900.000
21	2023-09-29	Sosial	Partisipasi Khitan Masal oleh PT BPR Bank Tulungagung	Masyarakat	11.100.000
22	2023-10-06	Sosial	Kegiatan Jambore BUMDES ke-3 Provinsi Jatim	PemKab Tulungagung	3.000.000
23	2023-10-11	Sosial	Partisipasi konsumsi Bimtek peningkatan kapasitas Perangkat Desa Kab Tulungagung	BPMPD	3.000.000
24	2023-10-19	Sosial	Santunan anak yatim dalam rangka Maulud Nabi Muhammad SAW	Masyarakat	3.000.000
25	2023-10-19	Sosial	Pelatihan UMKM muslimat PAC NU Karangrejo	PAC NU Karangrejo	10.000.000
26	2023-10-31	Sosial	Partisipasi Jalan Sehat oleh Dinas Koperasi Kab Tulungagung	Dinas Koperasi	2.000.000
27	2023-11-10	Sosial	Partisipasi kegiatan Jambore BUMDES ke-3 Prov Jatim	PemKab Tulungagung	1.000.000
28	2023-11-30	Sosial	Partisipasi Pameran & Kontes Lokal Bonsai oleh Disperindag Tulungagung	Disperindag Tulungagung	450.000
29	2023-11-30	Sosial	Kegiatan Funbike HUT Tulungagung oleh PT BPR Bank Tulungagung	Masyarakat	69.575.562
30	2023-12-21	Sosial	Bantuan Donasi An. Anak Zain Ds Punjul Karangrejo	Anak Zain	1.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan Pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda), Terima Kasih.

Kabupaten Tulungagung, 26 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda)



Drs. SUKAJI, M.Si
Komisaris Utama



SUHERMIN, SE
Direktur Utama